

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Radja Grafindo
- Achmad Ali Dan Wiwie Heryani. 2017. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Kencana.
- _____. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Arifin, Anwar.1984. *Strategi Komunikasi*. Bandung : Armico.
- Bachan. Mustafa. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bagir. Manan. 2014. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Surabaya: Kencana.
- Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers : Jakarta.
- _____. 2017. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Cutlip, Scoot M. 2007. *Efektive Publik Relation*, Edisi IX cetakan ke 2 Jakarta : Kencana,
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Edi Suryadi. 2018. *Strategi Komunikasi analisis teori dan Praktis*, Catakan ke 1. Bandung : Remaja Rosdaya Karya.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

- Guntur Hamzah. 2010. *Panduan Memahami Peraturan Daerah*. Jakarta : Kencana
- Harold. D. 2012. *Laswell. Reading media Theory 2nd Editon*. London : Rautledge
- _____. 2011. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Soejito, Irawan. 1978. *Teknik Membuat Peraturan Daerah dan Beberapa proses penyempurnaan*. Jakarta : Yayasan karya dharma.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta : Kencana.
- _____. 2017. *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Kencana.
- M. Solly Lubis. 1989. *Landasan dan teknik perundang-undangan*, cetakan ketiga. Jakarta : Mandar Maju.
- Mahendra Putra Kurnia, 2007. *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Marwan. 2014. *Penghantar ilmu hukum*. Bogor : Penerbit Ghaila Indonesia.
- Dennis, McQuail. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Moedoeng, Arif Fakrullah. 2005. *Legal Drafting berporos Hukum Humanis Partisipatoris*. Jakarta : PT Perca.
- Nurudin. 2004. *Komunikasi Massa*. Cespur : Malang.
- Nuryani Soyomukti. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Notohamidjojo A. 1970. *Makna Negara Hukum*. Bandung : Penerbit Kristen.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusions of innovations, Forth Edition*. New York : Tree Press.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto. 2004. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja
- Suprpto, H. 2008. *Bunga Rampai Administrasi Publik*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Suryadi, Edi. 2018. *Strategi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sastropoetro, R. A. S. 1990. *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak Dalam Komunikasi Sosial*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Swastha, Basu. 1993. *Strategi Komunikasi*. Bandung : Armico
- Unde, Alimuddin. 2014. *Televisi & Masyarakat Pluralistik*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Gramedia Widiasarana. Jakarta : Indonesia.

Jurnal :

- Akbar, M. (2020). *Communication Audit Techniques Of Designing Strategic Plan Of The Government Of Makassar City*. *international Journal of Advanced Science and Technology* (29 (4s) Hal (973-980)
- Bramantyo, R. Y. (2018). *Fungsi Hukum dalam Perubahan Sosial*. 1–6.
- Fitriani, Yuni. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat. 19(2) : 148-152.
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2), 78–92.
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Isdiyanto, I. Y. (2018). Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 54.

- Jurnal, K., & Hukum, I. (2013). Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 519–546.
- Kenedi, J., Syariah, F., Islam, D. E., Bengkulu, I., Raden, J., Pagar, F., & Bengkulu, D. (2002). *Studi Analisis Terhadap NilaiNilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam*.
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201.
- Lutfiana, I., Ilmu, D., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Diponegoro, U., & Daerah, P. H. (2017). Mekanisme perumusan produk hukum daerah.
- Pala. R. 2012 Partisipasi Masyarakat dalam rancangan Peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik di Kota Pare Pare. *Jurnal PEKOMNAS*, 15 (1) :11-12
- Rafiqah Julia, (2014) Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 2014.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusions of innovations, Forth Edition*. Tree Press : New York.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 1–25.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
- Syafitri, W. (2015). Perencanaan Strategi Sistem Informasi/Teknologi Informasi Universitas Lancang Kuning Menggunakan Metode Ward And Peppard. *Teknologi Informasi & Komunikasi Digital Zone*, 7(1), 31–43.
- Toni, T. (2017). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(2), 1–5.
- Tunggala. dan Saadjad. (2019), Strategi Komunikasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mempromosikan Objek Wisata Kabupaten Banggai. *Jurnal Komunikasi Untar*. 11 (2) : 197-212.

Wadu'ud, Abdul dan Tuti Bahfiarti. (2016). *Pola Penyebarluasan Informasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) tentang Pemberdayaan Masyarakat Lansia di Kabupaten Maros*. Jurnal Komunikasi KAREBA. 5(1) : 130-145.

Zarkasi, A. (2004). *Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Uniesitas Jambi*.

Zubair F, Dewi R, dan Retasari (2018). Strategi Komunikasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan PTNBH. *Profetik Jurnal Komunikasi*, 11(2), 1–5.

Peraturan :

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang walet.



Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kab. Polewali



Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum & Perundang-Undangan



Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Polewali mandar

Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Kab.Polman





Sarang Burung Walet



Spanduk

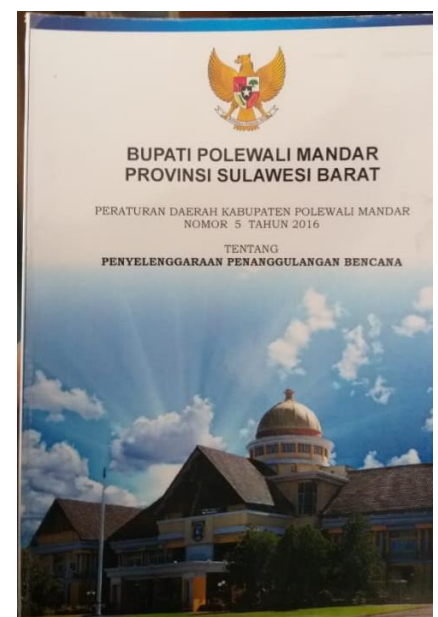
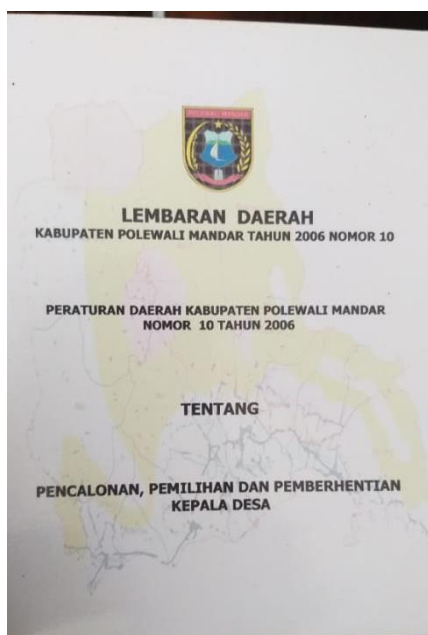


Kepala Bidang Pelayanan Dinas PTSP

Perpustakaan JDIH Bagian Hukum



Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum



Dokumen Buku Perda

**INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
 PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

A. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

No	Komponen Monitoring Evaluasi	Bobot	Kondisi Pemenuhan				Nilai (bobot x skor)
			Lengkap (100)	Ada Sebagian Besar (50)	Ada Sebagian Kecil (25)	Tidak Ada (0)	
INFORMATIF							
1							
A Pengelolaan Informasi Melalui Website							
1 Website OPD merupakan Sub Domain dari www.polmankab.go.id							
2 Penyajian Profil Organisasi :							
a Nilai dan Perilaku Budaya Kerja Proaktif							
b Profil pejabat Eselon II, III dan IV							
c Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi							
d Struktur Organisasi							
e Indikator Kinerja Utama Organisasi							
f LHKPN/ LHKASN							
g Informasi terkait alamat lengkap dan kontak OPD							
3 Informasi Layanan							
a Motto, Janji, Maktumat, Kode Etik Pelayanan							
d Produk dan Standar Pelayanan							
f SOP							
g Survey Kepuasan Pelayanan							
h Pengelolaan Pengaduan							
100%							
60%							
25%							
2%							
5%							
0,5%							
1%							
0,5%							
0,5%							
1,0%							
1%							
0,5%							
5%							
1%							
1%							
1%							
1%							
1%							

